

## KAPABILITAS DINAS PERIKANAN DAN KETAHANANPANGAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK BUDIDAYA IKANDI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

<sup>1</sup>Windri Wardani, <sup>2</sup>Rahyunir Rauf

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau,  
Pekanbaru, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau,  
Pekanbaru, Indonesia

<sup>2</sup>Corresponding Author: rahyunir.ip@soc.uir.ac.id

### ABSTRACT

*The Department of Fisheries and Food Security has a function in empowering fish breeders in Kuantan Singingi Regency. To carry out these functions, 20 types of activities have been determined as stated in the work plan in 2019. The research objective is to determine and analyze the Capability of the Fisheries Service and Food Security in Empowering Fish Cultivation Groups in Kuantan Singingi Regency and to provide problem solving. Capability of the Fisheries Service and Internal Food Security. Empowerment of Fish Cultivation Groups in Kuantan Singingi Regency. This type of research is a descriptive survey using qualitative methods. Data were obtained from research informants who were determined by means of the informant determination technique using snowball sampling. Data collection was carried out by means of interviews, observation, and documentation, then all data collected was carried out by data validation steps and then analyzed one by one so that the research results could be drawn in the form of conclusions. The results of the study found that the capability of the Fisheries and Food Security Office of Kuantan Singingi Regency in empowering fish farming groups has been carried out with human resources, existing policies, predetermined budget allocations, and the existence of empowerment techniques that have been established every year. In the Capability of the Department of Fisheries and Food Security of Kuantan Singingi Regency in empowering fish farming groups, there are several obstacles in the form of a lack of human resources and limited budget funds allocated for implementing programs in the aquaculture sector.*

Keywords: *Capability, Empowerment, Aquaculture Group*

### INTRODUCTION

Pemerintahan memiliki beberapa fungsi yang harus dijalani untuk menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka ditetapkan beberapa kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan berbagai fungsi pemerintahan. Kebijakan ditetapkan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, sampai dengan Peraturan yang lebih rendah di tingkat daerah.

Kesemua kebijakan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan. Salah satu bidang yang menjadi perhatian sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pembagian tugas pusat dan daerah adalah bidang perikanan.

Perikanan budi daya dan budi daya perikanan adalah satu kesatuan yang sama dengan cakupan berbeda. Perikanan budi daya merupakan pengelolaan bidang perikanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dikembangkan di daerahnya. Sementara budi daya

perikanan adalah masyarakat yang melakukan budi daya bidang perikanan pada kawasan yang terkontrol.

Perbandingan produksi perikanan di Provinsi Riau yang bersumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan menunjukkan bahwa pada tahun 2018, dari sejumlah 219.406,2 ton total produksi ikan, sebanyak 102.100,9 ton atau 46,54 persen merupakan hasil perikanan laut. Sedangkan 117.305,3 ton hasil dari perairan umum, tambak, kolam keramba, keramba, tambak dan jaring apung.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus mengupayakan pengembangan sektor perikanan khususnya melalui budi daya. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang memiliki perkembangan budi daya ikan yang pesat dan memasok kebutuhan ikan yang cukup besar. Pengelolaan sektor perikanan ikan yang dimiliki daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak terlepas dari fungsi kelompok pembudi daya ikan sebagai media pembangunan yang sangat strategis untuk memproduksi, mengelola, dan menggalipotensi ikan.

Kelompok pembudi daya ikan dihadapkan pada permasalahan akses permodalan usaha perikanan yakni sebagian besar pembudi daya belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal. Hal ini diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, khususnya yang terjadi pada pembudi daya ikan berskala kecil. Lahan budi daya juga sebagian besar belum memiliki sertifikat kepemilikan resmi sehingga tidak dapat dijadikan agunan. Saat ini masyarakat pembudi daya ikan hanya bergantung dari bantuan modal dari pemerintah daerah selain modal yang dimiliki sendiri.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, terus gencar untuk membangun masyarakat melalui usaha perikanan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kuansing adalah membangun kelompok pertanian di bidang perikanan khususnya pada budidaya ikan. Kuantan Singingi sampai saat ini masih memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk lahan perikanan. Untuk potensi lahan perikanan di Kabupaten Kuansing secara keseluruhan yang akan di garap sampai saat ini ada 22.000.

Pemaparan mengenai budi daya perikanan tersebut tidak terlepas dari kewenangan dan fungsi yang dimiliki pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan hasil produksi ikan dan juga dalam upaya memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah. Untuk itu pada masalah budi daya perikanan tentunya dalam pemerintah dinakhodai oleh sebuah instansi sebagai pelaksana kewenangan di bidang perikanan.

Untuk melaksanakan kewenangan di bidang perikanan dan kelautan tersebut pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Salah satu perangkat daerah yang dibentuk tersebut yakni Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan demikian jelaslah bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tugas dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang perikanan budi daya. Hal ini perlu dilakukan karena kontribusi pendapatan dari perikanan masih rendah dengan potensi perikanan Indonesia yang melimpah. Saat ini pemerintah sedang mengembangkan perikanan budi daya. Perikanan budi daya merupakan alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan akan ikan. Perikanan budi daya mempunyai potensi untuk dikembangkan dan program perikanan budi daya mulai dijalankan di seluruh provinsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan ditemukan beberapa fenomena- fenomena sebagai berikut:

Lahan dan jumlah masyarakat atau kelompok pembudi daya ikan di Kabupaten Kuantan Singingi sangat berpotensi menghasilkan produksi ikan yang besar. Namun kecukupan bibit unggul dan pakan yang mahal menyebabkan potensi yang ada belum mampu tergarap dengan maksimal. Permasalahan ini tidak terlepas dari masih minimnya program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat pembudi daya perikanan. Di mana pelatihan pembibitan bisa dilakukan untuk mengurangi ketergantungan bibit unggul dari daerah lain, sehingga dibutuhkan program kerja yang mendasar dari setiap pemberdayaan masyarakat. Selain itu kemampuan dan sumber daya yang ada tidak diragukan lagi untuk menciptakan atau memproduksi pakan ikan sendiri, tetapi masih minimnya program yang tepat direncanakan dinas menjadi masalah yang belum mampu teruraikan sampai saat ini.

1. Hampir seluruh masyarakat atau kelompok pembudi daya ikan mendapat perhatian pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, akan tetapi belum seluruh mendapat bantuan pelatihan maupun bantuan modal dari pemerintah daerah.
2. Pihak yang berwenang menyelenggarakan pemberdayaan bidang perikanan adalah pemerintah daerah dengan melimpahkan kewenangannya pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Kurang mampunya pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat, sehingga program pemberdayaan yang dilaksanakan belum memberi hasil yang baik bagi perkembangan budi daya perikanan di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Kurangnya sumber daya manusia yang ditetapkan sebagai tenaga penyuluh di Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang berjumlah 8 orang PNS dan 18 orang PPL.
4. Kecilnya anggaran yang bisa dimanfaatkan pada tahun 2020 yakni Rp. 517.575.000,- sehingga program pembinaan masyarakat pembudidaya perikanan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Sementara dari program kerjayang ditetapkan diperkirakan memakan anggaran lebih kurang Rp. 2.000.000.000,-

Dari penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada tersebut dengan mengangkat sebuah penelitian dengan judul: “Kapabilitas Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan Dalam Pemberdayaan Kelompok Budidaya Ikan Di Kabupaten Kuantan Singingi”.

Kapabilitas atau kemampuan adalah berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas dan pekerjaan berarti dapat melakukan tugas, pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat dan keadaan ditujukan kepada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada. Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia.

Kapabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.<sup>37</sup> Pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (*skill*) saja namun lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar-benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya.

Menurut Hagell III dan Brown, kapabilitas merupakan kemampuan untuk memobilisasi sumber daya untuk menghasilkan nilai yang melebihi ongkos. Sumber daya yang dimaksud

mencakup sumber daya yang memiliki wujud fisik (*tangible resources*) dan yang memiliki sifat nirwujud (*intangible resources*). Sumber daya yang memiliki sifat wujud yang konkret antara lain adalah sumber daya *financial*, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik. Sedangkan yang biasanya dianggap merupakan sumber daya yang nirwujud antara lain adalah talenta, hak milik intelektual, jejaring kerja sama, dan merek (*brands*), ada juga seperti potensi atau kekuatan karakternya, kompetensi yang dimilikinya, dan kapabilitasnya untuk mengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan untuk menciptakan nilai.

Berdasarkan pengertian kapabilitas yang telah diungkapkan, maka dapat didefinisikan sebagai sebuah kemampuan yang memiliki lebih dari hanya keterampilan pada suatu hal yang menjadi keunggulan bersaing dan menguasai kemampuan dari titik kelemahan.

Kapabilitas organisasi yaitu kapasitas organisasi dalam menempatkan dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi keinginan dan hasil yang dikehendaki oleh organisasi. kapabilitas organisasi memerlukan berbagai keahlian individual yang diintegrasikan dengan teknologi, peralatan dan berbagai sumber daya lainnya.

Merujuk pada pendapat beberapa pakar tersebut, maka kapabilitas organisasi adalah kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan dan mengeksplorasi sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut, baik sumber daya manusia, keuangan, kelembagaan dan lain-lain. Kapabilitas organisasi tidak dapat tercipta hanya dengan satu sumber daya saja tanpa dukungan sumber daya lainnya.

Dalam menentukan keberhasilan kapabilitas organisasi, perlu di perhatikan adalah fungsi keuangan, operasi, dan sumber daya manusia. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sumber dana, cara pengelolaannya, sehingga menciptakan keuangan yang sehat dalam penjalanan aktivitas dari organisasi tersebut.

- a) Operasi, memiliki sistem operasi yang baik apakah mau *continus* (di mana produk diproses secara berkelanjutan sehingga perlu perangkat otomatis) atau bisa jugayang berkaitan dengan *operating leverage*, terkait dengan bagaimana dampak aktivitas penjualan berdampak pada pendapatan.
- b) Sumber Daya Manusia, memiliki tim kerja yang solid, hubungan industrial, mutu suasana kerja yang baik, serta perhatian perusahaan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sumber daya dan faktor penting yang harus dimiliki pemerintah untuk menciptakan organisasi yang berkemampuan baik, yang harus dimiliki ialah:<sup>41</sup>

- a) Kelembagaan, pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin *networking* dengan semua level pemerintah
- b) Sumber Daya Manusia, memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas, serta memiliki personel dengan pengetahuan yang baik tentang manajemen bencana. Implementasi Kebijakan

Tersedianya undang-undang, kebijakan, dan peraturan sebagai landasan pengambilan Keputusan, menjalin hubungan dengan institusi lainnya serta untuk memobilisasi sumber daya.

- a) Keuangan, memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua aktivitas dalam manajemen bencana.

- b) Teknis, memiliki sistem logistik manajemen dan sistem teknologi informasi yang efektif untuk dapat berkomunikasi dan menjalin Networks dengan berbagai *stakeholder*.
- c) Kepemimpinan, memiliki kapasitas kepemimpinan yang dapat membuat Keputusan yang cepat dan tepat.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, peneliti akan menggunakan teori kapabilitas organisasi yang di kemukakan oleh Kusumasari dengan menggunakan empat indikator, yaitu: sumber daya manusia, implementasi kebijakan, keuangan dan teknis. Di mana dari 6 indikator yang telah ditetapkan Kusumasari, terdapat 2 indikator sudah jelas keberadaannya yakni kelembagaan dan kepemimpinan. Kelembagaan dan kepemimpinan dalam penelitian ini telah terwakili dari lembaga yang diteliti yakni Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sementara kepemimpinan sudah terwakili dari berbagai berbagai bidang yang ada di instansi, sehingga peneliti hanya menetapkan 4 indikator sebagai tolak ukur dari kapabilitas.

## METHODS

Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya. Survey adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Metode survey membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung.

Kemudian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya di manfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Penggunaan tipe ini bertujuan mengukur secara cermat dengan menggunakan metode kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada pada penelitian ini mengenai Kapabilitas Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Dalam Pemberdayaan Kelompok Budidaya Ikan di Kabupaten Kuantan Singingi. Survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari informan yang telah ditetapkan

## RESULT AND DISCUSSION

### Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi tonggak utama dari setiap instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Di mana pada penelitian sumber daya manusia menjadi tolak ukur pertama untuk melihat kapabilitas dari Bidang Perikanan Budidaya dalam memberdayakan masyarakat pembudidaya ikan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Budidaya diperoleh informasi sebagai berikut: a) pegawai Dinas 8 orang dan PPL 18 orang; b) Memadai; c) Kepala Dinas, Bidang Budidaya

*Perikanan, Bidang P2HP, dan PPL Perikanan. d) Secara garis besar membina kelompok pembudidaya; e) PPL Perikanan; f) Sudah jelas.*

Tanggapan yang disampaikan kepala Bidang Perikanan Budidaya menjelaskan bahwa di bidang tersebut terdapat hanya terdapat 8 orang pegawai negeri sipil dan 18 orang tenaga PPL yang bertugas membantu dalam menjalankan semua pekerjaan yang diemban Bidang Perikanan baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam melakukan penyuluhan lapangan kepada para pelaku budi daya perikanan. Selain itu dengan sumberdaya yang dimiliki bisa saling bersinergitas dalam rangka membina kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas budi daya perikanan, sehingga dengan sinergitas yang ada bisa menghasilkan ikan budi daya yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas kemampuan pegawai sudah memadai untuk melakukan pemberdayaan kelompok budi daya ikan. Di mana semua pegawai yang ada baik itu ASN maupun PPL sudah mengetahui dengan jelas tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga semua pekerjaan dapat dikerjakan sesuai dengan fungsi masing-masing. Di mana dalam melakukan pemberdayaan ada pegawai yang bertugas melakukan perencanaan secara administrasi dan ada pegawai yang bertugas turun langsung ke lapangan memberikan penyuluhan kepada masyarakat petani ikan.

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi yang khusus bertanggungjawab dalam pemberdayaan kelompok budi daya ikan dimulai dari Kepala Dinas, Bidang Budidaya Perikanan, Bidang P2HP atau Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan, dan tenaga PPL perikanan. Dengan adanya 2 bidang yang menangani masalah pemberdayaan masyarakat pembudidaya perikanan ini tentunya memberikan perhatian yang besar dalam bidang perikanan.

Tugas dan fungsi bidang/seksi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi yang menangani pemberdayaan kelompok budi daya ikan sebagian besar melakukan pembinaan pada kelompok masyarakat pembudidaya perikanan dalam usaha untuk meningkatkan produksi perikanan di Kabupaten Kuantan Singingi. Di mana dengan adanya perhatian besar terhadap bidang perikanan ini tentunya ada target yang hendak dicapai yakni menjadikan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai sentra perikanan di Provinsi Riau, sehingga kebutuhan ikan di masyarakat bisa terpenuhi dari lokal.

Sementara dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembenuhan Bidang Perikanan Budidaya diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

- a. Pegawai pada Dinas Perikanan terdiri dari PNS 8 orang, Penyuluh PNS 5 orang, dan Pegawai Non PNS 58 orang .
- b. Pemberdayaan kelompok budi daya ikan dimulai dari Kepala Dinas, Bidang Perikanan Budidaya didukung seksi-seksi dibawahnya.
- c. *Penyuluh perikanan lapangan dan pegawai pada Bidang Perikanan Budidaya.*

Dari hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi sudah memiliki tenaga penyuluh di lapangan yang berjumlah 9 orang dengan komposisi 7 orang PNS dan 2 orang honorer. Jumlah ini tidak mencukupi untuk ditetapkan pada masing- masing kecamatan, sehingga ada beberapa tenaga penyuluh bertugas pada 2 wilayah kecamatan, sehingga kurang efektif dalam memberikan penyuluhan ke lapangan. Dalam menjalankan tugasnya terdapat pembagian tugas antara tenaga penyuluh yang memberikan

penyuluhan di lapangan dan memonitoring petani perikanan, sementara pegawai di Kantor menyiapkan segala administrasi yang dibutuhkan serta menyusun program kerja yang diperlukan tenaga penyuluh. Adanya konsistensi pelaksanaan program kerja pengembangan sistem penyuluhan perikanan, sehingga setiap tahunnya terdapat berbagai program yang hampir samad saling mendukung program kerja tahun sebelumnya. Kemudian terdapat pembangunan fisik dan non fisik yang dilaksanakan dalam mengembangkan sistem penyuluhan perikanan di lapangan.

Begitu juga dengan hasil tanggapan yang disampaikan Kepala Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di bawah ini:

a) *Sebanyak 8 orang Pegawai pada Dinas Perikanan yang menangani masalah pemberdayaan kelompok budi daya perikanan yakni Bidang P2HP, (Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan) dan bidang Perikanan Budidaya; b) Sesuai dengan SOP dan berkemampuan untuk melaksanakan tugasnya; c) Bagian yang menangani pemberdayaan kelompok budi daya yaitu Bidang P2HP dan Bidang Perikanan Budidaya; d) Pemberdayaan kelompok, penyuluhan teknis perikanan ke KLP, bantuan pembiayaan kelompok atau kelembagaan; e) Seksi Penyuluhan yang terlibat langsung dalam pemberdayaan kelompok ikan di lapangan; f) Sudah yaitu di Seksi Penyuluhan Bidang P2HP.*

Tanggapan mengenai sumber daya manusia yang ada di Dinas Perikanan terutama pada bidang budi daya perikanan terdapat sebanyak 8 orang Pegawai pada Dinas Perikanan yang menangani masalah pemberdayaan kelompok budi daya perikanan yakni Bidang P2HP (Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan) dan Bidang Perikanan Budidaya. Seluruhnya bekerja sesuai dengan SOP dan berkemampuan untuk melaksanakan tugasnya, sehingga dengan melaksanakan SOP dan kemampuan yang dimiliki mampu memberikan kontribusi yang besar bagi instansi terutama dalam melakukan pemberdayaan kelompok budi daya perikanan.

Dalam melakukan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat khususnya budi daya perikanan terdapat bagian tertentu yang ditugaskan untuk menangani pemberdayaan kelompok budi daya yaitu Bidang P2HP dan Bidang Perikanan Budidaya. Dengan demikian dalam melakukan pemberdayaan budi daya perikanan terdapat 2 bidang yang saling bahu membahu dalam menjalankan berbagai program budi daya perikanan.

Pemberdayaan kelompok budi daya perikanan dilakukan dengan memberikan penyuluhan teknis perikanan ke KLP, bantuan pembiayaan kelompok atau kelembagaan. Di mana pegawai yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat atau kelompok budi daya perikanan adalah Seksi Penyuluhan yang terlibat langsung dalam pemberdayaan kelompok ikan di lapangan.

Berdasarkan hasil tanggapan yang disampaikan pada penelitian indikator sumber daya manusia di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sudah memiliki sumber daya manusia dalam berbagai kategori atau status yakni PNS, Non PNS, dan PPL. Di mana semua pegawai yang ada berkerja pada bidang masing-masing dan sesuai dengan kemampuannya.

Di mana dalam melakukan pemberdayaan kepada kelompok budi daya perikanan ditangani atau berada pada kewenangan Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan. Untuk melaksanakan pemberdayaan banyak kegiatan yang dilakukan baik itu dalam meningkatkan kemampuan pegawai maupun memberdayakan masyarakat petani perikanan.

Dengan demikian dari tanggapan pada sumber daya manusia ini, secara garis besar Dinas Perikanan sudah memiliki sumber daya manusia yang memadai. Tetapi dengan besarnya potensi perikanan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi rasanya jumlah pegawai yang belum memadai.

Di mana kekurangan pegawai ini terletak dari jumlah pegawai PPL yang masih sedikit, di mana dalam memberikan penyuluhan di lapangan terdapat beberapa pegawai yang menangani 2 kecamatan yang seharusnya dengan potensi perikanan ini setiap kecamatan minimal memiliki 1 tenaga penyuluh perikanan.

Sementara dari tanggapan yang disampaikan masyarakat petani budi daya perikanan yang merupakan Ketua Kelompok Budidaya Perikanan Benai yang telah mendapat pembinaan mengatakan sebagai berikut: a) *10 kelompok*; b) *Setiap kelompok menerima asuransi, bibit, dan pellet*; c) *Pembinaan dalam bentuk pelatihan dan perawatan ikan*.

Dari tanggapan yang diberikan masyarakat ini secara umum memberikan gambaran bahwa masyarakat sudah menerima pemberdayaan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi melalui beberapa program yakni adanya bantuan asuransi perikanan, bantuan bibit, dan pelet, serat peralatan atau mesin pengolahan pakan ikan. Sementara untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang keahlian diberikan pelatihan-pelatihan bidang perikanan, sehingga semua petani perikanan yang diberikan pelatihan bisa meningkatkan mutu budi daya perikanan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan telah memberikan diklat dengan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan diklat cara pembenihan ikan yang baik (BPIB). Hasil ini menggambarkan bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan telah melakukan dan memberikan bantuan kepada petani ikan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan berupa cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB).

Kemudian Dinas Perikanan membuka jaringan pemasaran hasil produksi dengan memotivasi berdirinya koperasi perikanan yang bergerak di bidang pemasaran hasil perikanan dan memberikan bantuan pengolahan pakan dan rekomendasi modal usaha berupa izin usaha bidang perikanan. Hal ini tentunya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mudah lagi dalam memasarkan produk budi daya perikanan berupa hasil panen ikan, kemudian memudahkan dalam mendapatkan pakan yang bisa diolah sendiri, serta adanya perizinan yang membuka peluang bagi masyarakat budi daya perikanan untuk mendapatkan pinjaman modal dari berbagai lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil pengamatan lapangan yang penulis lakukan terlihat bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan telah melakukan berbagai cara untuk pemerataan hasil produksi budidaya perikanan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani serta memberikan kesempatan kepada petani untuk membuat kelompok tani. Selain itu ada juga bantuan-bantuan yang bersifat materi seperti adanya bantuan bibit ikan dan pakan ikan, serta alat atau mesin pengolahan pakan ikan. Kemudian agar masyarakat pembudidaya perikanan tidak mengalami kerugian atas usaha yang dijalani, maka pemerintah melalui Dinas Perikanan telah memberikan asuransi perikanan pada masing-masing kelompok budi daya perikanan yang sudah terdaftar di Dinas Perikanan.

Dengan demikian jelaslah bahwa pada segi sumber daya manusia kapabilitas Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi sudah memadai, sehingga diharapkan dengan kapabilitas bidang sumber daya manusia yang dimiliki mampu memberikan dan menghasilkan budi daya perikanan yang berkualitas.

## Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang sudah ditetapkan. Di mana pada penelitian kebijakan yang diteliti adalah pemberdayaan masyarakat dalam pembudidayaan perikanan. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan memberi dampak bagi masyarakat terutama masyarakat pembudidayaan perikanan baik itu dalam usaha meningkatkan jumlah petani, jumlah produksi, dan kualitas dari perikanan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Budidaya diperoleh informasi sebagai berikut: a) Perbup No. 33 Tahun 2016; b) Selalu melakukan pendampingan kelompok melalui PPL, memberikan bantuan kepada kelompok; c) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan Kementerian Kelautan dan Perikanan; d) Melaksanakan pelatihan terhadap SDM sesuai dengan profesinya.

Dinas Perikanan melaksanakan kebijakan dilandasi dari peraturan dan ketentuan yang sudah dilimpahkan kewenangannya melalui tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Bupati. Di mana salah satu tugas yang ditetapkan untuk dilaksanakan dan merupakan kebijakan adalah memberikan pendampingan kepada masyarakat pembudidayaan perikanan serta melakukan koordinasi dengan instansi bidang perikanan di tingkat Provinsi dan Kementerian.

Dinas Perikanan dalam menjalankan kewenangannya di bidang budi daya perikanan mengacu pada Perbup Nomor 33 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Di mana salah satu bentuk tugas yang dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan selalu melakukan pendampingan kelompok melalui PPL atau tenaga penyuluh perikanan, memberikan berbagai jenis bantuan kepada kelompok baik berupa materi maupun dalam bentuk peningkatan kemampuan.

Untuk melaksanakan kewenangan di bidang perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat pembudidayaan perikanan. Untuk itu setiap pegawai diberikan berbagai macam pelatihan berupa peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan profesinya.

Sementara dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembenihan Bidang Perikanan Budidaya diperoleh beberapa informasi sebagai berikut: a) Perbup No. 33 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi; b) Membuat dan melaksanakan program pengembangan sistem penyuluhan perikanan, pengembangan budi daya perikanan; c) Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain seperti kementerian kelautan dan perikanan RI; d) Mengoptimalkan potensi sumber daya pegawai (SDM penyuluh dan pegawai di Dinas).

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan Dinas Perikanan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan terutama berasal dari peraturan bupati tentang tugas dan fungsi dinas. Di mana dengan adanya tugas tersebut Dinas memiliki kewajiban untuk membuat dan melaksanakan program pengembangan sistem penyuluh perikanan dan pengembangan budi daya perikanan dalam usaha untuk memberdayakan masyarakat budi daya perikanan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian dengan tugas dan fungsi tersebut dalam usaha untuk memberdayakan budi daya perikanan dibutuhkan koordinasi dengan instansi-instansi vertikal yakni dari tingkat provinsi sampai kepada kementerian kelautan dan perikanan. Dengan adanya koordinasi dan kerja sama

antar instansi akan memberi dampak baik bagi pemberdayaan pembudidaya perikanan, sehingga masyarakat pembudidaya dapat melakukan budi daya dengan maksimal dan memberikan hasil yang baik.

Begitu juga dengan hasil tanggapan yang disampaikan Kepala Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di bawah ini: a) Perbup No. 33 Tahun 2016; b) Melaksanakan program pengembangan budi daya perikanan dan program sistem penyuluhan perikanan; c) Koordinasi dengan Dinas Perikanan Provinsi dan KKP RI; d) Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada.

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan jenis-jenis ikan yang akan dibudidayakan oleh petani dan memiliki nilai jual tinggi serta sesuai dengan kondisi alam di Kuantan Singingi. Jenis tempat budidaya perikanan yang ideal yakni berada di Desa Seberang Taluk (Kawasan Minapolitan). Sarannya pembentukan kelompok-kelompok pembudidaya, bantuan mesin pakan, dan perbaikan saluran irigasi dan jembatan produksi.

Selain menetapkan lokasi budidaya yang ideal, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan juga memberikan bantuan sarana prasarana pendukung bagi para petani ikan seperti membentuk kelompok tani agar mudah melakukan penataan dan memberikan bantuan, memberikan bantuan mesin pembuatan pakan, jembatan produksi, dan sebagainya.

Pernyataan yang diberikan di atas terlihat bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan perencanaan program kerja pada Bidang Perikanan Budidaya, sehingga dengan perencanaan yang telah ditetapkan arah dari kegiatan atau program bisa lebih jelas dan terukur. Di mana rencana yang paling strategi ditetapkan adalah dengan melakukan pengembangan terhadap sentra-sentra budi daya perikanan yang kemudian dilanjutkan dengan bersama-sama mencari solusi pemasaran atas hasil usaha budi daya perikanan yang telah dijalankan. Dengan demikian perencanaan pemberdayaan kelompok budi daya perikanan tidak hanya sebatas hulunya saja tetapi direncanakan sampai ke hilir yakni pasar dari produksi budi daya perikanan yang dihasilkan.

*Pelaksanaan pengembangan melakukan sosialisasi kepada pembudidaya tentang cara budidaya ikan yang baik (CBIB). Membuka lahan-lahan budidaya bahkan lahan bekas tambang emas untuk memperluas lahan budidaya perikanan.*

Jelaslah bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan telah melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun demikian tidak semua rencana yang telah dibuat bisa dilaksanakan karena terbatasnya waktu dan anggaran yang tersedia.

*Jenis ikan yang dibudidayakan petani ikan di Kabupaten Kuantan Singingi yakni ikan lele, ikan patin, ikan nila, ikan mas dan ikan bawal.* Dengan demikian jelaslah bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan jenis-jenis ikan yang akan dibudidayakan oleh petani dan memiliki nilai jual tinggi serta sesuai dengan kondisi alam di Kuantan Singingi. Di mana jenis-jenis ikan yang berpotensi untuk dibudidayakan di Kabupaten Singingi adalah ikan lele, ikan patin, ikan nila, ikan mas, dan ikan bawal. Keseluruhan jenis ikan ini sangat berpotensi untuk dikembangkan dan dibudidayakan, sehingga saat ini sebagian besar kelompok perikanan sudah banyak membudidayakan ikan lele dan ikan patin serta ikan nila sebagai jenis ikan yang dibudidayakannya.

*Jenis tempat budidaya perikanan yang ideal yakni berada di Desa Seberang Taluk (Kawasan Minapolitan). Sarananya pembentukan kelompok-kelompok pembudidaya, bantuan mesin pakan, dan perbaikan saluran irigasi dan jembatan produksi.*

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan jenis tempat atau lokasi yang ideal dalam membudidayakan ikan. Selain menetapkan lokasi budidaya yang ideal, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan juga memberikan bantuan sarana prasarana pendukung bagi para petani ikan seperti membentuk kelompok tani agar mudah melakukan penataan dan memberikan bantuan, memberikan bantuan mesin pembuatan pakan, jembatan produksi, dan sebagainya.

*Seringkali kelompok tani tidak berjalan sesuai dengan harapan, sehingga sebagian dari anggota tidak aktif lagi.*

Pengamatan yang penulis lakukan terlihat banyak kelompok tani yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah memiliki akta pendirian kelompok dan tidak sedikit pula kelompok tani yang telah dibentuk tidak lagi aktif dalam melaksanakan budidaya perikanan karena berbagai persoalan seperti kekurangan modal, lahan yang sudah dijual, atau anggota kelompok yang sudah tidak lagi kompak.

Wawancara langsung memberikan, serta hasil observasi sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi sudah melaksanakan program kerja yang sesuai dengan rencana ditetapkan Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya terutama pada melakukan penataan kelompok tani dan memberdayakan kelompok tani ikan agar aktif dalam aktivitas budidayaperikanan.

*“Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan telah memberikan diklat dengan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan diklat cara pembenihan ikan yang baik (BPIB).*

Hasil ini menggambarkan bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan telah melakukan dan memberikan bantuan kepada petani ikan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan berupa cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB).

*Membuka jaringan pemasaran hasil produksi dengan memotivasi berdirinya koperasi perikanan yang bergerak di bidang pemasaran hasil perikanan dan memberikan bantuan berupa kendaraan roda dua dan roda3 bagi pedagang ikan.*

Hasil pengamatan lapangan yang penulis lakukan terlihat bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan telah melakukan berbagai cara untuk pemerataan hasil produksi budidaya perikanan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani serta memberikan kesempatan kepada petani untuk membuat kelompok tani.

Berdasarkan data dan uraian tersebut, diketahui bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan program kerja kurang terlaksana. Hasil ini dikarenakan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan masih kesulitan menjalin kerjasama untuk memasarkan hasil produksi ikan dikarenakan belum terdata dengan jelas hasil produksi ikan yang dihasilkan petani setiap bulannya.

*“Saran yang sering disampaikan petani ikan yakni petani berharap pegawai Dinas supaya sering memonitoring usaha budidaya terutamapara penyuluh perikanan/PPL sebagai ujung tombak dinas”.*

Saran yang diberikan petani ikan kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam memberdayakan petani pembudidaya perikanan perlu ditindak lanjuti untuk mendapatkan hasil

produksi ikan yang baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga kebutuhan akan ikan dapat terpenuhi dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat petani.

*“Penyuluh perikanan diharuskan membuat dan memberikan laporan bulanan/tahunan tentang perkembangan produksi perikanan di wilayah kerja mereka masing-masing”*

Hasil yang diperoleh dari wawancara serta observasi lapangan, terlihat jelas bahwa pelaksanaan program kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam Bidang Perikanan Budidaya sudah terlaksana. Dimana Dinas telah menerima saran atau masukan dari para petani mengenai kelebihan dan kekurangan atas pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan dan melakukan analisa atas masukan yang diberikan untuk dicari solusinya demi perbaikan program kerja.

Salah satu kebijakan Pemerintah Kuantan Singingi dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah sesuai dengan sumberdaya alam yang dimiliki adalah dengan mengusulkan Kuantan Singigni sebagai salah satu kawasan pengembangan Minapolitan. Komitmen tersebut juga sejalan dengan pada visi pemerintah daerah, antara lain dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi di sektor perikanan air tawar yang berwawasan lingkungan, diversifikasi usaha budidaya, dan peningkatan kualitas hasil produksi sehingga dapat memberikan nilai tambah dan berdaya saing yang tinggi di pasar.

Kebijakan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi sejak lama memang telah dirintis dan diarahkan pada sektor perikanan, yaitu melalui penetapan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai kawasan sentra produksi perikanan air tawar di Provinsi Riau yang mana tercatat bahwa sampai dengan tahun 2019, perkembangan sektor perikanan terutama budidaya perikanan cukup meningkat baik kuantitas maupun kualitas serta jumlah petani yang menggeluti bidang perikanan di Kuantan Singingi.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang menjadi sentra dalam pengembangan komoditas perikanan terutama patin di Indonesia. Sektor ini merupakan salah satu sektor unggulan di mana berdasarkan indikator makro pembangunan tahun 2014-2019, sektor ini diharapkan dapat tumbuh dan memberikan kontribusi yang besar terutama dalam mendukung kebijakan yang terkait dengan penyediaan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan maupun kontribusinya terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian.

Pengamatan yang penulis lakukan terlihat banyak kelompok tani yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah memiliki akta pendirian kelompok dan tidak sedikit pula kelompok tani yang telah dibentuk tidak lagi aktif dalam melaksanakan budidaya perikanan karena berbagai persoalan seperti kekurangan modal, lahan yang sudah dijual, atau anggota kelompok yang sudah tidak lagi kompak.

Sementara dari tanggapan yang disampaikan masyarakat petani budi daya perikanan yang merupakan Kelompok Budidaya Perikanan yang telah mendapat pembinaan mengatakan sebagai berikut:

*Semua kelompok yang ada sudah memiliki badan hukum minimal disetujui oleh Camat dan ada yang sudah memiliki akta notaris kelompok.*

Berdasarkan tanggapan yang telah disampaikan para informan dan pengamatan yang ada di lapangan jelas bahwa secara implementasi kebijakan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sudah melaksanakan kewenangan sesuai dengan SOP yang ada, sehingga pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan. Sementara dari segi petani budi daya perikanan sudah ada yang memiliki

badan hukum atas kelompok-kelompok budi daya yang didirikan masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa secara implementasi kebijakan tidak lagi menjadi permasalahan, sehingga menjadi kekuatan bagi Dinas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

## CONCLUSION

1. Kapabilitas Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemberdayaan kelompok budi daya ikan sudah dijalankan dengan sumberdaya manusia yang dimiliki, kebijakan yang ada, alokasi anggaran yang sudah ditetapkan, dan adanya teknis pemberdayaan yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.
2. Dampak dari pemberdayaan kelompok budi daya perikanan yang telah dilakukan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi mampu meningkatkan hasil produksi ikan dan pendapatan petani budi daya perikanan.
3. Dalam Kapabilitas Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemberdayaan kelompok budi daya ikan terdapat beberapa kendala berupa masih kurangnya jumlah SDM yang dimiliki dan terbatasnya anggaran dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program bidang perikanan budi daya.
4. Problem solving dalam pemberdayaan kelompok budi daya ikan dapat dilakukan melalui membentuk kemitraan usaha budi daya perikanan. Memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi kelompok budi daya perikanan. Kemudian membentuk kelembagaan perikanan yang bisa dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah sebagai

## REFERENCES

### A. Book

- Amir, M Taufik. 2011. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Arikunto, Suharsimi 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Hasan, Engking Soewarman. 2002. *Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul*. Bandung: Pustaka Rosda Karya.
- Hurairah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Irzal Effendi dan Mulyadi. 2012. *Budidaya Perikanan*. Jakarta: UT.
- Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal* . Yogyakarta: Gava Media.
- Misdianti dan Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moenir, H.A.S. 1996. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexi J 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mubyarto. 1994. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES..
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh. Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology Jilid 1 dan 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2008. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintah: Plus Dua Belas Langkah Strategis*. Jakarta: Media Brilian.
- Surjadi. 2012. *Pengembangan Kinerja Organisasi Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Rineka Cipta.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Pustaka Indonesia Press.
- Teguh, Ambar. 2011. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gava Media
- Widodo, Joko. 2008. *Good Governance : Telaah Dan Dimensi Akuntabilitas Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Instan Cendikia.

## **B. Journal**

- Desy Ulandari, Iman Surya, Budiman. 2019. Peran Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, Dan Pertanian Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Bontang. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2019, 7 (1): 323-336 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
- Hertria Maharani Putri, Asnawi dan Yayan Hikmayani. 2010. Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sebagai Bentuk Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Budidaya Lele (Studi Kasus di Desa Salamredjo Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, DIY). *J. Bijak dan Riset Sosek KP*. Vol.5 No.2, 2010
- Mohammed Aladalah, Yen Cheung and Vincent Lee Faculty of Information Technology, Clayton, Monash University, Melbourne, Australia. 2015. Enabling Citizen Participation in Gov 2.0: An Empowerment Perspective. *Electronic Journal of e-Government Volume 13 Issue 2 2015*.
- Neal D. Buckwalter Grand Valley State University. 2014. The Potential for Publicempowerment through Government-Organized Participation. *Public Administration Review*, Vol. 74, Iss. 5, pp. 573-584. © 2014. The Authors. *Public Administration Review* published by Wiley Periodicals, Inc. On behalf of The American Society for Public Administration
- Sholihin Ali, Muhammad Idris, Anwar Parawangi. 2017. Peranan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. *Jurnal Otoritas Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Yutaro Sakai, Nobuyuki Yagi, Ussif Rashid Sumaila. 2019. Fishery subsidies: the interaction between science and policy. *Fisheries Science* (2019) 85:439– 447

- Zulfiani, A. Gau Kadir, dan Nurlinah. 2012. Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 5, Nomor 2, Juli 2012 (65-74). Universitas Hasanuddin.
- Doni, D., Yogya, M. A., & Wedayanti, A. A. P. M. D. (2021, January). Management of Market Pelita Retribution In Bangko District In Increasing Original Revenue of Rokan Hilir Regency. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 41). European Alliance for Innovation.
- Ispik, A., Yogya, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion. *Pekanbaru City*.
- Munir, A., Wahyudi, S., & Zainal, Z. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Produk Yang Diperankan Oleh Sales Promotion Girl Di Kota Pekanbaru. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 6(2), 21-35.
- Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman, N. (2020). Analisis Framing" Aksi Bela Islam" sebagai Dakwah Islam di Riau Pos (A Framing Analysis of" Islam Defense Action" as Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). *Jurnal Dakwah Risalah*, 31(1), 35-47.
- Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. *ETTISAL: Journal of Communication*, 5(1).
- Riauan, M. A. I., Kholil, S., & Sikumbang, A. T. (2019). Islamic Symbols on Political Messages in Newspapers in Riau (Study in Regional Head Election 2017). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2(1), 254-262.
- Riauan, M. A. I., & Aziz, A. (2019). Professional Gamer: The Meaning on 'Point Blank Online'Play. *Jurnal The Messenger*, 11(1), 18-26.
- Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna Perilaku Merokok di Kalangan Dosen Universitas Islam Riau. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(02), 207-222.
- Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna Perilaku Merokok di Kalangan Dosen Universitas Islam Riau. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(02), 207-222.
- Subhayano, T., Yogya, M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Good Governance in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci District. *Pelalawan Regency*.
- Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Subhayano, T., Yogya, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency.
- Satria, A., Yogya, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office in Development of Cultural Heritage at Kuantan Singingi Regency. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social*

Science, InCEEES 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 282). European Alliance for Innovation.

Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2).